

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN TAMBRAUW

2019



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN TAMBRAUW

2019



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) KABUPATEN TAMBRAUW 2019

No. Publikasi : 91090.1936
No. Katalog BPS : 7102025.9109
No. ISSN : 2301-9778

Ukuran Buku : 14,8 X 21 cm
Jumlah Halaman : vi Romawi + 35 Halaman

Penyunting : BPS Kabupaten Sorong
Naskah : BPS Kabupaten Sorong
Gambar Kulit : BPS Kabupaten Sorong
Diterbitkan Oleh : BPS Kabupaten Sorong
Dicetak Oleh : BPS Kabupaten Sorong

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)
KABUPATEN TAMBRAUW 2019**

Anggota Tim Penyusun:

Penanggung Jawab : Ir. Siswanto, MMA

Editor : Adelia C. Br Tarigan, S.Tr.Stat

Penulis : Mahardika Usman, SST

<https://tambrauwbps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi “Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tambrauw 2019” merupakan publikasi yang menyajikan angka dan penjelasan dari IKK Kabupaten Tambrauw Tahun 2019. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat berbagai kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang berkaitan dengan sektor konstruksi serta sebagai bahan baku untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Kritik dan saran sangat diharapkan dari pengguna publikasi ini guna perbaikan pada terbitan selanjutnya.

Sorong, Desember 2019
Kepala BPS Kabupaten Sorong

Ir. Siswanto, MMA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	5
BAB II KONSEP DAN DEFINISI	7
BAB III METODOLOGI	17
3.1 Ruang Lingkup dan Sumber Data	17
3.2 Metode Penghitungan IKK	17
3.3 IKK 2019	23
BAB IV ANALISIS IKK KABUPATEN TAMBRAUW	25
4.1 Profil Kabupaten Tambrauw	25
4.2 IKK Kabupaten Tambrauw	28
DAFTAR PUSTAKA	35

<https://tambrauwkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada suatu daerah diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diberlakukannya undang-undang otonomi daerah sejak 1 Januari 2001, merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah.

Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam upaya

menutupi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang terjadi antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalani fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Asas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU tersebut memerlukan dukungan data yang valid, akurat, dan terkini sehingga pembagian DAU ke setiap daerah menjadi adil, proporsional, dan merata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan DAU disamping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.

IKK adalah suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antar wilayah. Untuk menghitung IKK diperlukan beberapa data yaitu: harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, upah jasa konstruksi, dan bobot/diagram timbang. Data harga dan upah didapat dari Survei Serentak Harga Barang Bangunan/Konstruksi, Sewa Alat Berat, Upah Jasa Kontruksi dalam rangka penghitungan IKK yang dilakukan setiap triwulan oleh

Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Sementara itu, bobot/diagram timbang IKK diperoleh dari *Bill of Quantity* (BoQ). BoQ adalah realisasi pembangunan suatu konstruksi di kabupaten/kota yang bersangkutan. Realisasi pembangunan tersebut berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit bangunan per satuan ukuran luas dari 5 jenis bangunan yang ditentukan.

Sebagai salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung kebutuhan daerah, IKK berkaitan erat dengan keinginan dan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dengan membangun sarana dan prasarana yang berupa bangunan fisik seperti: bangunan gedung, jalan, jembatan, saluran irigasi, dan lain sebagainya. Perbedaan kondisi dan potensi geografis di masing-masing wilayah serta jarak antar wilayah menyebabkan terjadinya perbedaan pembiayaan untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar digunakannya IKK untuk penyesuaian kebutuhan daerah dilihat dari sektor bangunan/konstruksi.

Mengingat kebutuhan akan pentingnya angka IKK sebagai komponen penghitungan DAU maka disusunlah publikasi “Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tambrau 2019” ini, dengan harapan bahwa data yang termuat dalam publikasi ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dalam rangka penghitungan DAU, serta bagi masyarakat, akademisi, atau pelaku usaha yang ingin melihat keterbandingan Kabupaten Tambrau terhadap daerah-daerah lainnya dalam hal yang berkaitan dengan besaran biaya konstruksi.

1.2 Tujuan

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penyusunan publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tambrau 2019 ini adalah:

1. Memberikan gambaran komponen-komponen penyusun IKK Kabupaten Tambrau Tahun 2019;
2. Mengetahui berapa nilai IKK Kabupaten Tambrau Tahun 2019;
3. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan daerah dan pembangunan daerah, sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten Tambrau kedepannya dapat lebih terarah dan tepat sasaran;
4. Merupakan salah satu ukuran yang dapat menjadi *starting point* bagi Pemerintah Kabupaten Tambrau dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Tambrau pada tahun-tahun yang akan datang; dan
5. Untuk membantu pengambil kebijakan, peneliti, atau konsumen data lainnya dalam memahami keadaan masyarakat Kabupaten Tambrau secara lebih spesifik.

<https://tambrauwkab.bps.go.id>

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan IKK antara lain: konsep mengenai harga barang konstruksi termasuk harga sewa alat berat, pedagang besar, pedagang campuran, kegiatan konstruksi, tingkat kemahalan konstruksi, diagram timbang, dan indeks kemahalan konstruksi.

1. **Harga perdagangan besar (HPB)** adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama untuk suatu barang.
2. **Harga produsen** adalah harga transaksi yang terjadi antara petani (penghasil) dan pembeli (pedagang besar/distributor) dalam jumlah besar di pasar pertama atas suatu barang.
3. **Harga eceran** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang eceran sebagai penjual dengan konsumen sebagai pembeli secara eceran/satuan yang digunakan untuk konsumsi langsung bukan untuk diperjualbelikan.

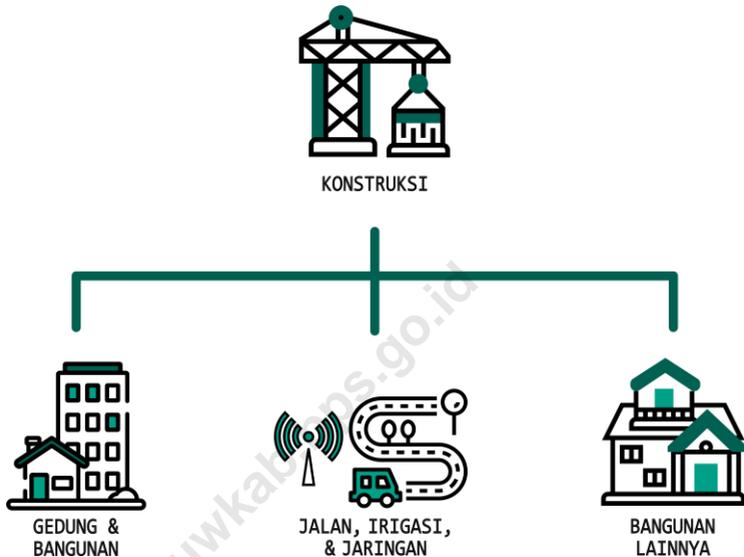
4. **Harga pedagang campuran** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang yang menjual barang secara *party/grosir* dan juga menjual barang secara eceran dengan konsumen baik yang digunakan untuk konsumsi langsung atau konsumsi tidak langsung.
5. **HPB bahan bangunan/konstruksi** adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (*party*) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/*supplier* bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.
6. **Produsen** adalah penghasil barang-barang yang dilakukan baik secara manual maupun dengan bantuan mesin.
7. **Pedagang besar** adalah pengusaha/pedagang yang menjual bahan bangunan/konstruksi dalam jumlah besar (*party/grosir*).
8. **Pedagang campuran** adalah pedagang yang dalam menjual barang dagangannya sebagian dilakukan secara partai besar dan sebagian lagi dilakukan secara eceran, sedangkan data harga

yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar.

9. **Party/grosir** atau jumlah besar yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif mengingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.
10. **Kegiatan konstruksi** adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan.

Sektor konstruksi diklasifikasikan kedalam tiga kategori yang disebut *basic heading* yang dapat dilihat seperti berikut:

Gambar 1.
Basic Heading



Gedung dan bangunan yang termasuk dalam perhitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Gedung dan bangunan untuk tempat tinggal, meliputi rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas.
2. Gedung dan bangunan bukan untuk tempat tinggal meliputi gedung perkantoran, industri, kesehatan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.

Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam perhitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Bangunan umum untuk pekerjaan pertanian, terdiri dari:
 - a. Bangunan pengairan, meliputi pembangunan waduk (*reservoir*), bendungan (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, terdiri dari:
 - a. Pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta, meliputi pembangunan jalan dan jembatan kereta.

- c. Bangunan dermaga, meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi terdiri dari:
- a. Bangunan elektrikal, meliputi pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi.
 - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 - c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - d. Konstruksi sentral komunikasi, meliputi bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.

- e. Instalasi air, meliputi instalasi air bersih dan air limbah, dan saluran drainase pada gedung.
- f. Instalasi listrik, meliputi pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah, dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan tinggi.
- g. Instalasi gas, meliputi pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal, dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- h. Instalasi listrik jalan, meliputi instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
- i. Instalasi jaringan pipa, meliputi jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan klasifikasi untuk bangunan lainnya terdiri dari bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah,

pemasangan bangunan konstruksi prefab, dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

11. **Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/ organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, mingguan, dan bulanan. Harga sewa termasuk biaya sewa alat, jasa operator alat, tetapi tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek dan bahan bakar.
12. **Upah** adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kegiatan konstruksi, upah jasa konstruksi meliputi upah mandor, kepala tukang, tukang, dan pembantu tukang.
13. **Paket komoditas** adalah sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen

penghitungan IKK. Komoditas/jenis barang tersebut dipilih karena memenuhi asas *representativeness* dan *comparability* yaitu andil yang cukup besar dan data harganya dapat dipantau serta mempunyai tingkat keterbandingan antar kabupaten/kota. Paket komoditas disebut juga sebagai kualitas nasional.

14. **Kualitas provinsi** adalah kualitas yang dominan disuatu provinsi tetapi tidak dominan bila ditinjau secara nasional. Kualitas provinsi digunakan sebagai dasar konversi kedalam kualitas nasional untuk kualitas nasional yang memang tidak terdapat di provinsi tersebut.
15. **Diagram timbang** atau bobot yang digunakan dalam penghitungan IKK 2019 terdiri dari diagram timbang IKK dengan pendekatan *Basket of Construction Components Approach* (BOCC) dan diagram timbang Umum. Diagram timbang umum yang digunakan dalam penghitungan IKK 2019 berasal dari realisasi anggaran daerah tingkat II (kabupaten/kota) untuk pembangunan konstruksi.
16. **Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)** adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu

kabupaten/kota atau provinsi terhadap tingkat kemahalan konstruksi rata-rata nasional.

17. **Bill of Quantity (BoQ)** adalah daftar dan kuantitas pekerjaan yang penyusunan dan perhitungannya didasarkan atas gambar lelang, spesifikasi teknis, dan spesifikasi umum yang digunakan sebagai standar acuan bagi peserta lelang dalam mengajukan penawaran harga.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Ruang Lingkup dan Sumber Data

Data dasar yang digunakan dalam penghitungan IKK tahun 2019 adalah harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang diperoleh dari survei secara serentak seluruh kualitas dari jenis barang yang memberikan andil besar dalam pembuatan suatu bangunan/konstruksi di seluruh kabupaten/kota. Sebagai pendukung, terdapat juga data BoQ yang diperoleh melalui kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum. BoQ yang digunakan dalam penghitungan IKK 2019 berupa realisasi pelaksanaan proyek menurut kelompok jenis pada tahun 2017 dan 2018.

3.2 Metode Penghitungan IKK

Komponen yang digunakan dalam penghitungan IKK didasarkan pada paket komoditas yang dipakai sebagai pendekatan dalam merumuskan Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK). TKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan/

konstruksi per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi yang diperoleh melalui pendekatan terhadap sejumlah bahan bangunan, dan jasa yang menjadi paket komoditas. Paket komoditas yang dimaksud mencakup barang-barang natural/penggalian, barang-barang hasil industri, serta sewa alat berat dan jasa. Dalam menyusun paket komoditas ini didasarkan pada asas *comparability* (keterbandingan), *representativeness* (keterwakilan), dan *trade off comparability vs representativeness*.

Setelah paket komoditas didapatkan, maka dibutuhkan pula diagram timbang kelompok jenis bangunan. Diagram timbang ini disusun berdasarkan kuantitas/volume bahan bangunan dan jasa yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas (m^2) menurut kelompok jenis bangunan/konstruksi.

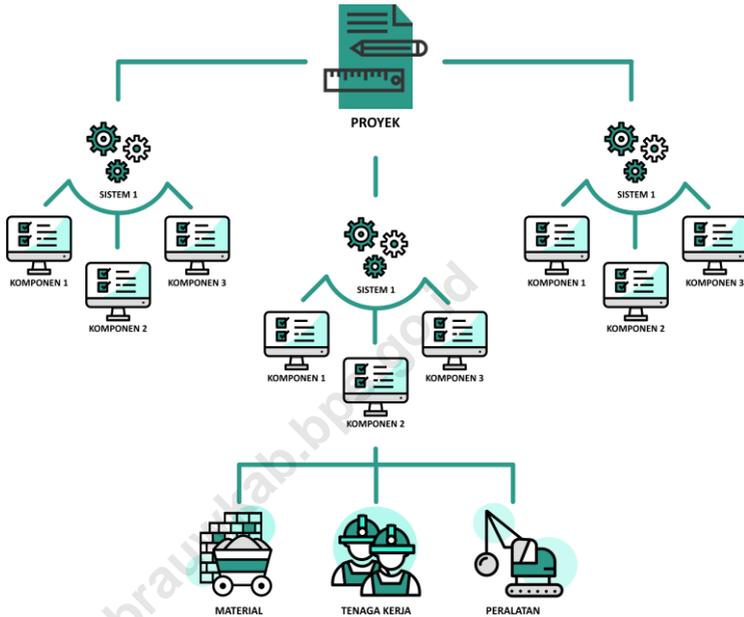
Diagram timbang ini juga diperlukan untuk pembentukan TTK setiap jenis barang. Data-data dalam diagram timbang ini didapatkan dari BoQ dari berbagai pihak yang telah melaksanakan proyek konstruksi sepanjang tahun 2017 dan 2018. Kemudian untuk melengkapi komponen di atas diperlukan pula data harga bahan bangunan dan tarif sewa alat berat yang

dikumpulkan melalui survei serentak yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Sorong.

Diagram timbang pada IKK 2019 menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC) yang didesain dengan tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan dalam IKK 2019 ini terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode BoQ.

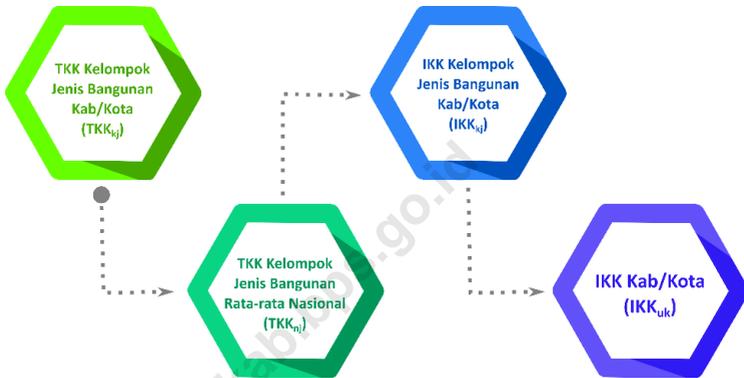
Gambar 2.
Hubungan antara proyek, sistem dan komponen



Biaya masing-masing komponen disusun dari biaya per unit dari material yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah tenaga kerja, koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun komponen tersebut. Konsep yang mendasar dari pendekatan BOCC adalah mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah komponen kemudian dibagi kembali kedalam beberapa item pekerjaan konstruksi. Setelah diperoleh komponen-komponen penyusun IKK diatas maka dapat dilakukan

penghitungan berdasarkan formula dengan alur seperti dibawah ini.

Gambar 3.
Alur Penghitungan IKK



Metode penghitungan IKK tahun 2019 menggunakan model statistik metode *Country Product Dummy* (CPD), yaitu:

$$p_{kn} = a_k b_n u_{kn}$$

Dimana,

p_{kn} = dimisalkan harga komponen konstruksi n di kabupaten k

a_k dan b_n = parameter yang akan diduga dari data harga

u_{kn} = random variabel yang berdistribusi identik dan independen

$$\begin{aligned}
 k &= 1, 2, \dots, K \\
 n &= 1, 2, \dots, N
 \end{aligned}$$

Dengan asumsi bahwa random variabel ini berdistribusi log normal atau dengan kata lain $\ln p_{kn}$ berdistribusi normal dengan mean 0 dan varian σ^2 , sehingga dalam bentuk logaritma model di atas berbentuk linear.

$$\begin{aligned}
 \ln p_{kn} &= \ln a_k + \ln b_n + \ln u_{kn} \\
 &= \alpha_k + \gamma_n + V_{kn}
 \end{aligned}$$

Parameter a_k diartikan sebagai tingkat harga konstruksi di kabupaten k relatif terhadap harga konstruksi di kabupaten lain yang sedang dibandingkan. Bila a_k dinyatakan sebagai relatif harga konstruksi terhadap kabupaten yang dijadikan referensi, katakan Kabupaten X. Maka, a_k adalah harga konstruksi di Kabupaten K relatif terhadap 1 (satu), yaitu harga di Kabupaten X. Dengan kata lain harga konstruksi di Kabupaten K 'setinggi' a_k dibanding harga konstruksi di Kabupaten X. Karena IKK di Kabupaten K dinyatakan dengan $IKK_k = \exp(a_k)$. Persamaan diatas dikalikan dengan 100 sehingga perbandingan data dinyatakan dalam persen.

3.3 IKK 2019

IKK telah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dan sebagainya. Peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2019 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan *updating* BoQ sampai tahun 2018.

IKK tahun 2019 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu akhir Juli 2018, akhir Oktober 2018, akhir Januari 2019, dan akhir April 2019. Seperti halnya IKK tahun 2018, IKK tahun 2019 menggunakan 4 periode

pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi sehingga lebih menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi.

<https://tambrauwkab.bps.go.id>

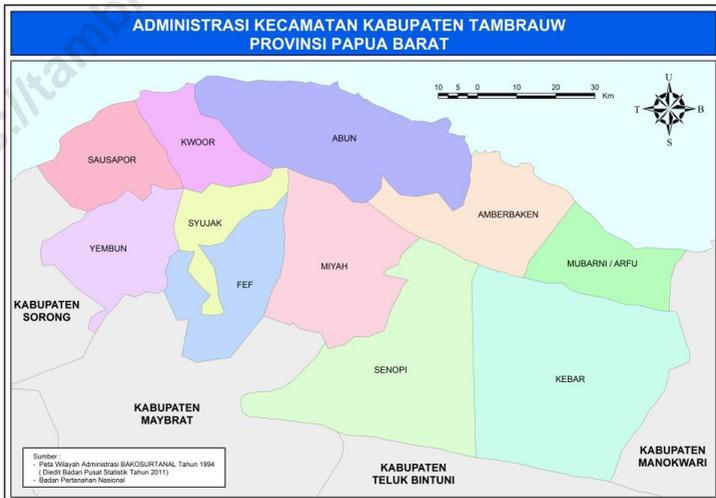
BAB IV

ANALISIS IKK KABUPATEN TAMBRAUW

4.1 Profil Kabupaten Tambrauw

Kabupaten Tambrauw yang terletak di puncak kepala burung Provinsi Papua Barat merupakan salah satu Kabupaten yang baru terbentuk di Provinsi Papua Barat. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008. Adapun luas wilayah Kabupaten Tambrauw sebesar 11.529,182 Km².

Gambar 4.
Peta Wilayah Kabupaten Tambrauw



Secara geografis, Kabupaten Tambrauw terletak pada koordinat $01^{\circ} 08' 00''$ hingga $08^{\circ} 18' 00''$ Lintang Selatan dan $131^{\circ} 56' 00''$ hingga $133^{\circ} 05' 00''$ Bujur Timur. Sedangkan batas administratif Kabupaten Tambrauw adalah sebagai berikut:

- Utara : Samudera Pasifik
- Selatan : Kabupaten Sorong Selatan
- Timur : Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari
- Barat : Kabupaten Sorong

Wilayah administrasi Kabupaten Tambrauw terdiri dari 12 distrik yaitu Sausapor, Kwoor, Abun, Fef, Syujak, Miyah, Yembun, Kebar, Senopi, Amberbaken, Mubrani/Arfu, dan Moraid. Distrik Fef merupakan ibukota Kabupaten Tambrauw, namun karena akses transportasi ke Distrik Fef masih sulit dan fasilitas penunjang pelayanan pemerintah di Distrik Fef terbatas, maka hingga saat ini pusat pemerintahan masih berada di Distrik Sausapor.

Salah satu tujuan pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah meningkatkan pemerataan persebaran penduduk sehingga dapat membantu dalam usaha peningkatan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu idealnya, komposisi jumlah penduduk sejalan dengan

luas wilayah keruangan suatu wilayah. Pada tahun 2018, Kabupaten Tambrau memiliki jumlah penduduk sebanyak 13.804 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 11.529,182 Km², kepadatan penduduk Kabupaten Tambrau pada tahun 2018 sebesar 1,20 jiwa/Km².

Tabel 1.
Jumlah Penduduk, Luas wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tambrau Tahun 2018

No.	Distrik	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Fef	447	562,87	0,79
2.	Syujak	219	244,64	0,90
3.	Miyah	372	837,76	0,44
4.	Abun	625	411,56	1,52
5.	Kwoor	967	1.430,77	0,68
6.	Sausapor	2.861	633,23	4,52
7.	Yembun	1.014	1.058,82	0,96
8.	Kebar	2.089	1.858,86	1,12
9.	Senopi	778	2.539,79	0,31
10.	Amberbaken	1.938	866,75	2,24
11.	Mubrani/Arfu	692	213,08	3,25
12.	Moraid	1.802	871,06	2,07

Sumber: Badan Pusat Statistik

4.2 IKK Kabupaten Tambrau

Indeks Kemahalan Konstruksi merupakan angka indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap Tingkat Kemahalan Konstruksi secara rata-rata Nasional.

Semakin tinggi IKK suatu daerah, maka biaya yang diperlukan untuk membuat suatu bangunan juga semakin besar, atau dengan kata lain kegiatan distribusi bahan bangunan/ konstruksi di daerah tersebut lebih sulit jika dibandingkan daerah lainnya. IKK yang rendah menunjukkan adanya nilai tambah suatu daerah terkait distribusi bahan bangunan/konstruksi yang berjalan baik dan kemudahan dalam membuat suatu bangunan.

Berikut ini hasil penghitungan IKK Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat:

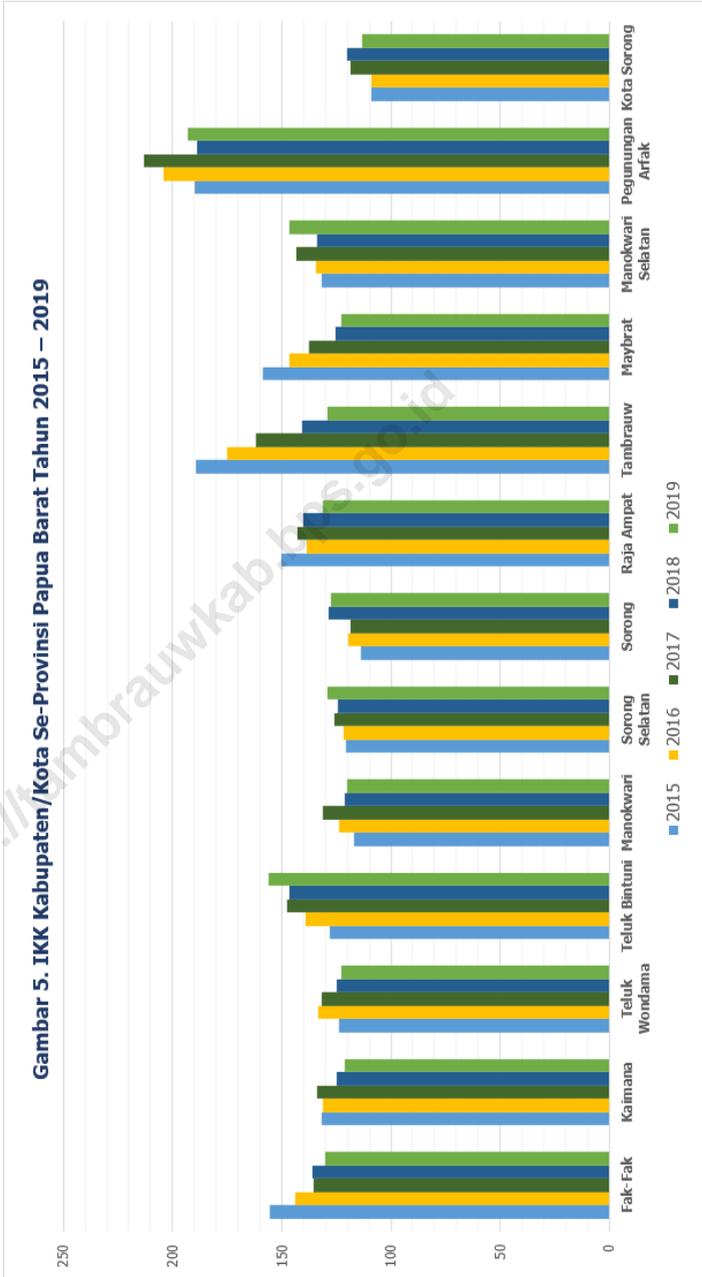
Tabel 2.
Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2015 – 2019

No	Kabupaten	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Fak-fak	155,59	144,09	135,50	135,83	129,89
2.	Kaimana	131,72	131,29	133,64	124,79	121,24
3.	Teluk Wondama	123,84	133,24	131,98	124,62	122,57
4.	Teluk Bintuni	128,17	138,91	147,63	146,40	156,26
5.	Manokwari	116,71	123,66	131,26	120,93	120,13
6.	Sorong Selatan	120,90	121,55	125,79	124,54	129,04
7.	Sorong	113,83	119,68	118,76	128,49	127,39
8.	Raja Ampat	150,35	138,52	142,91	140,26	131,12
9.	Tambrauw	189,10	175,04	162,05	140,90	129,16
10.	Maybrat	158,80	146,60	137,56	125,43	122,63
11.	Manokwari Selatan	131,58	134,53	143,12	133,96	146,32
12.	Pegunungan Arfak	189,75	203,96	213,03	188,95	192,80
13.	Kota Sorong	108,86	109,21	118,56	119,87	113,03

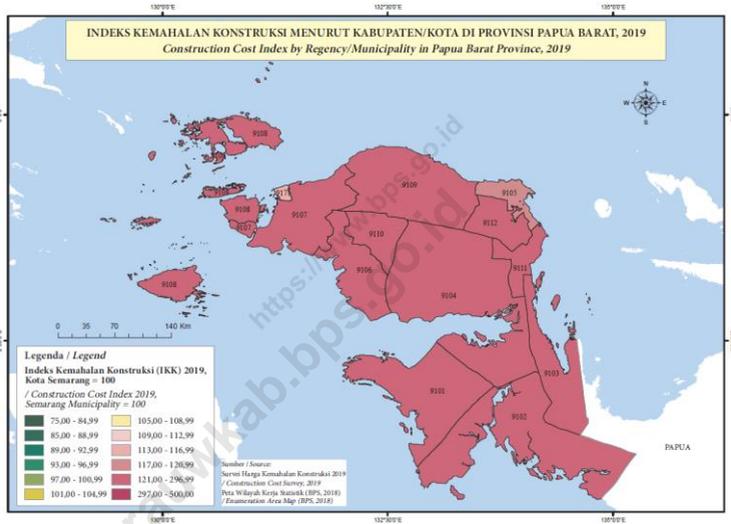
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, 3 kabupaten/kota yang memiliki IKK tertinggi pada tahun 2019 adalah Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 192,80; Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 156,26; dan Kabupaten Manokwari Selatan sebesar 146,32. Sedangkan 3 kabupaten/kota yang memiliki IKK terendah yaitu Kota Sorong sebesar 113,03; Kabupaten Manokwari sebesar 120,13; dan Kabupaten Kaimana sebesar 121,24.

Kabupaten Tambrau sendiri menempati posisi ke-8 IKK terendah di seluruh Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 129,16. Angka ini turun sebesar 11,74 poin dibanding tahun 2018.



Gambar 6.
 IKK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
 Tahun 2019



Sebelumnya, Kabupaten Tambrau merupakan bagian dari Kabupaten Sorong. Kondisi geografis yaitu jarak yang jauh menyebabkan mahal biaya transportasi sehingga berdampak pada tingginya harga barang-barang termasuk bahan-bahan konstruksi. Arus masuk barang ke Kabupaten Tambrau pada umumnya berasal langsung dari Kota Sorong, khususnya untuk barang-barang pabrik. Sebagai daerah pemekaran yang baru, keberadaan *supplier* yang mampu menyediakan barang-barang untuk kebutuhan konstruksi masih belum

ada. Di sisi lain, Kabupaten Tambrau yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti infrastruktur jalan dan jembatan menyebabkan arus distribusi barang ke Kabupaten Tambrau menjadi agak sulit. Arus distribusi juga bisa menjadi semakin sulit jika kondisi cuaca buruk karena akses jalan utama Kota Sorong - Kabupaten Tambrau yang masih belum diaspal sepenuhnya akan rusak.

Penggunaan barang-barang konstruksi yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Tambrau masih lebih besar bila dibandingkan dengan komoditas yang berasal dari dalam wilayah Kabupaten Tambrau sendiri. Bangunan konstruksi memerlukan berbagai macam jenis barang/bahan konstruksi yang saling melengkapi mulai dari pasir, batu, batu-bata, kayu, besi, semen, kaca, pipa, seng, aspal, dan sebagainya hingga penggunaan alat berat.

Diantara barang-barang konstruksi tersebut beberapa diantaranya dapat dihasilkan di Kabupaten Tambrau tanpa harus didatangkan dari luar kabupaten, seperti pasir, batu, dan kayu. Harga komoditas lokal tersebut tercatat relatif lebih murah dibandingkan harga rata-rata produk sejenis di Provinsi Papua Barat, namun karena *share* pemakaiannya dalam bangunan konstruksi

relatif kecil, pengaruhnya terhadap Tingkat Kemahalan Konstruksi juga tidak terlalu besar yang artinya pembentukan Tingkat Kemahalan Konstruksi lebih didominasi oleh barang-barang konstruksi yang di datangkan dari luar Kabupaten Tambrau.

<https://tambrauwkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2019. *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2019*.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Kabupaten Tambrau Dalam Angka 2019*.

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SORONG**

Jl. Basuki Rahmat Km. 13,5 Sorong

Telp: (62-951) 335485, Faks: (62-951) 335901

Homepage: <https://sorongkab.bps.go.id>, E-mail: 9107@bps.go.id